



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggall Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 29 Januari 2020/Periodik - 2019)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
UNIT KERJA : BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
SUB UNIT KERJA : BIDANG PERENCANAAN DAN PENGEMBANGAN PEGAWAI

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **MUHARYO INDRO YULIANTO**
2. Jabatan : **KEPALA SUBBIDANG FORMASI DAN PENGEMBANGAN**
3. NHK : **619229**

II. DATA HARTA**A. TANAH DAN BANGUNAN** Rp. 1.199.300.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 45 m²/84 m² di KOTA DEPOK ,
HASIL SENDIRI Rp. 400.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 91 m²/75 m² di KOTA SEMARANG ,
HASIL SENDIRI Rp. 346.500.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 88 m²/84 m² di KOTA SEMARANG ,
HIBAH DENGAN AKTA Rp. 452.800.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 206.700.000

1. MOBIL, HONDA JAZZ Tahun 2014, HASIL SENDIRI Rp.
180.000.000
2. MOTOR, KAWASAKI EX250J / SPD. MOTOR Tahun 2010, HASIL
SENDIRI Rp. 26.700.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 7.000.000**D. SURAT BERHARGA** Rp. ----**E. KAS DAN SETARA KAS** Rp. 53.937.437**F. HARTA LAINNYA** Rp. ----**Sub Total** Rp. 1.466.937.437**III. HUTANG** Rp. 27.080.620**IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)** Rp. 1.439.856.817

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta



kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini diumumkan dengan catatan **LENGKAP** berdasarkan hasil verifikasi tanggal **14 Februari 2020**.
4. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.